



EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MUJADALAH BIL LATI HIYA AHSAN

EVALUATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES THROUGH MUJADALAH BIL LATI HIYA AHSAN

Roni Oka Frayoga

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Imam Bonjol, Kota Padang, Indonesia
Email:putraroni214@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 15, 2025

Revised September 10, 2025

Accepted October 10, 2025

Available online October 15, 2025

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat,
Evaluasi, Mujadalah Al Lati Hiya
Hasan

Keywords:

*Community Empowerment,
Evaluation, Mujadalah Al Lati
Hiya Ahsan*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks pendekatan Mujadalah Al Lati Hiya Ahsan (MAHA). Evaluasi bukan hanya sekadar proses formal, melainkan landasan utama untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan kualitas dari program-program pemberdayaan. MAHA, berakar dari nilai-nilai Islam, mengutamakan dialog terbuka, pemahaman bersama, serta penyelesaian konflik yang adil dan terbaik bagi semua pihak. Evaluasi menyeluruh dalam pendekatan ini mencakup analisis pemecahan konflik yang berkeadilan, peningkatan kualitas hidup melalui aspek pendidikan dan ekonomi lokal, serta keterlibatan pihak terkait. Dengan menerapkan evaluasi yang holistik terhadap pemberdayaan masyarakat menggunakan MAHA, diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, mengukuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi sebagai instrumen vital dalam menjamin kesinambungan dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

This article aims to examine the role of evaluation in community empowerment, with a particular focus on the Mujadalah Al Lati Hiya Ahsan (MAHA) approach. Evaluation in this context is not merely a formal requirement but serves as a critical foundation to ensure the effectiveness, sustainability, and quality of empowerment programs. MAHA, which is rooted in Islamic values, prioritizes open dialogue, mutual understanding, and fair conflict resolution that benefits all stakeholders. A comprehensive evaluation within this framework involves assessing just and equitable conflict resolution mechanisms, improving quality of life through educational advancement and local economic development, and fostering stakeholder engagement. By applying a holistic evaluation process, the MAHA approach is expected to generate long-term positive impacts, reinforce active community participation in development processes, and enhance social, economic, and spiritual well-being. Ultimately, this highlights the indispensable role of evaluation as a vital instrument for sustaining and ensuring the success of community empowerment initiatives.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi fokus utama dalam pembangunan komunitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Namun, untuk memastikan bahwa

upaya pemberdayaan tersebut efektif dan berdampak positif, evaluasi yang cermat dan terencana perlu dilakukan.

Dalam konteks ini, metode evaluasi menjadi hal krusial untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat telah mencapai tujuannya. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah mujadalah bil Latihya Ahsan, sebuah pendekatan diskusi terstruktur yang memberikan kerangka kerja bagi penilaian menyeluruh terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya evaluasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat serta bagaimana mujadalah bil Latihya Ahsan dapat menjadi alat yang efektif dalam mengukur dampak dan keberhasilan dari kegiatan tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek kunci evaluasi dan manfaat pendekatan ini, artikel ini akan menjelaskan bagaimana pendekatan mujadalah bil Latihya Ahsan dapat memberikan wawasan mendalam dan memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks penggunaan metode mujadalah bil Latihya Ahsan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan bersifat library research (penelitian kepustakaan) atau disebut juga content analysis (analisis isi). Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan yaitu mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber dari bahan-bahan tertulis kemudian mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual yaitu dengan mencari hubungan antara data dengan realitas yang penulis teliti. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka dilakukan dengan analisis kritis, komparasi, serta interpretasi atas berbagai hasil penelusuran dari sumber-sumber primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi memainkan peran yang krusial dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar proses evaluasi rutin, tetapi merupakan pondasi penting untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara komprehensif mengenai beberapa alasan utama mengapa evaluasi menjadi sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Margayaningsih, 2018).

1. Mengukur Efektivitas Program

Proses evaluasi berfungsi sebagai mekanisme di mana pengukuran sejauh mana program pemberdayaan masyarakat mencapai tujuan yang telah ditentukan dimungkinkan. Melalui proses evaluasi kita dapat melakukan penilaian apakah kegiatan yang telah dilakukan memang menghasilkan keuntungan yang diantisipasi bagi masyarakat yang sedang ditargetkan. Pengukuran ini berperan penting dalam menjamin bahwa sumber daya yang telah dialokasikan untuk upaya pemberdayaan masyarakat digunakan dengan cara yang efektif dan efisien (Munthe, 2015).

2. Identifikasi Keberhasilan dan Tantangan

Melalui proses melakukan evaluasi, menjadi mungkin untuk membedakan pencapaian yang dicapai serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hasil yang diperoleh dari evaluasi ini berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan pendekatan, merumuskan solusi, dan mengatasi hambatan yang berpotensi menghambat kemenangan program yang akan datang (Ir. Hendra Hamid, 2018).

3. Memperbaiki Kualitas Program

Evaluasi memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat. Melalui analisis yang mendalam terhadap hasil evaluasi, dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada berbagai aspek program, seperti penyesuaian strategi, peningkatan metode pelaksanaan, atau penambahan sumber daya yang diperlukan (Cahya Nirmaya, 2019).

4. Memastikan Dampak yang Berkelanjutan

Evaluasi yang teratur dan komprehensif membantu dalam memastikan bahwa dampak dari program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan pemantauan yang terus-menerus, program dapat disesuaikan dan ditingkatkan untuk menjaga dampak positifnya seiring berjalannya waktu (Sandi et al., n.d.).

5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Proses evaluasi merupakan komponen penting yang meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi di antara penyelenggara program. Dengan menerapkan proses evaluasi yang terbuka dan jujur, penyelenggara program dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat bertanggung jawab atas keputusan, hasil, dan alokasi sumber daya yang telah mereka buat. Akibatnya, proses ini membantu dalam menumbuhkan kepercayaan dan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Sangki et al., 2017).

Dengan mendasarkan pembahasan pada poin-poin tersebut, jelaslah betapa pentingnya evaluasi dalam menjaga kualitas, dampak, dan keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat. Evaluasi bukan hanya sekadar proses penilaian, tetapi merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan komunitas.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Mujadalah Bil-Lati Hiya Ahsan

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.(Noor, 2011)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan,ketidak berdayaan dan segala bentuk keter- belakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu serat kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas.(Haris, 2014)

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bawasanya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan harapan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Hal ini dapat tercapai dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam menentukan arah pembangunan yang lebih baik bagi semua anggota masyarakat.

Selanjutnya kegiatan pemberdayaan yang Islami menuntut seorang Da'i/fasilitator mengetahui dan memahami metode pemberdayaan berbasis dakwah dengan baik. Maka dari itu penulis akan membahas bentuk dan metode pemberdayaan berbasis dakwah yaitu, metode *al-hikmah, al-mauizhoh al-hasannah* dan *al-mujadalah billati hiya ahsan* sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dibahas ini berfokus menggunakan pendekatan berbasis Mujadalah Bil-Lati Hiya Ahsan.(Masrul, 2010)

Dari segi bahasa kata mujadalah berasal dari kata jadala yang bermakna memintal, melilit. Kata jadala dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan.

Secara istilah *al-mujadalah bi-al-lati hiya ahsan* berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Diskusi yang baik tidak saling menyudutkan dan melecehkan pihak lain, apalagi sampai melahirkan permusuhan. Antara yang satu dengan lainnya harus saling menghargai dan menghormati, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, *al-mujadalah* merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberi argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya berpegang kepada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima kebenaran tersebut.(Hanif, 2021)

Dalam proses penerapannya metode ini memberikan penanaman pemahaman yang lebih mendalam serta memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh melalui diskusi terbuka dan dialog, metode ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan nilai-nilai kehidupan yang relevan. Hal ini dapat memperkuat landasan moral, etika, dan nilai-nilai positif dalam masyarakat.

Melalui pendekatan Mujadalah Bil-Lati Hiya Ahsan, tercipta suatu lingkungan yang mendukung perkembangan yang holistik, di mana masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam

diskusi, belajar dari satu sama lain, serta memperkuat nilai-nilai yang mendukung pembangunan sosial dan spiritual yang berkelanjutan. Ini merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, memungkinkan mereka menjadi agen perubahan yang berdaya dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka serta komunitas mereka.

Dalam prosesnya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam dialog terbuka, pendekatan ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memecahkan masalah dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini tidak hanya memperkaya solusi yang dihasilkan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan atas keputusan dan langkah-langkah yang diambil. Melalui dialog yang dilakukan dengan sikap hormat dan kesopanan, tercipta lingkungan yang mendukung kerjasama yang produktif, serta rasa saling pengertian dan rasa hormat terhadap perbedaan.

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mujadalah Al Lati Hiya ahsan

Mujadalah Al Lati Hiya Ahsan merupakan sebuah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam. Konsep ini menekankan pada penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat dengan cara yang terbaik atau lebih baik (ahsan) yang diambil dari ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa (4:128)

Evaluasi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan MAHA dapat meliputi beberapa aspek:

1. Pemecahan Konflik yang Berkeadilan

Pemecahan konflik yang berkeadilan merupakan salah satu inti dari pendekatan MAHA (Mujadalah Al Lati Hiya Ahsan). Konsep ini menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui dialog yang adil, serta memprioritaskan kebaikan bersama tanpa merugikan pihak tertentu. Evaluasi efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan perselisihan dapat dilakukan dengan berbagai cara

Pertama, pada konsep partisipasi dan kesetaraan, evaluasi dapat menilai sejauh mana pendekatan MAHA memastikan partisipasi setara dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Ini mencakup apakah ada upaya untuk mendengarkan semua pandangan dan kepentingan serta menghormati keberagaman perspektif.

Kedua, pada bagian keadilan proses, bermaksud evaluasi juga bisa menilai sejauh mana proses penyelesaian konflik yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mencakup penggunaan metode yang transparan, adil, dan terbuka, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum, norma, dan keadilan.

Ketiga, kemampuan penyelesaian konflik, bermaksud evaluasi dapat melihat sejauh mana pendekatan MAHA berhasil dalam menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien. Ini meliputi penyelesaian konflik tanpa meninggalkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Keempat, penerimaan solusi, Evaluasi bisa mempertimbangkan sejauh mana solusi yang dihasilkan dari proses dialog MAHA diterima oleh semua pihak yang terlibat. Apakah solusi tersebut dianggap adil dan memuaskan bagi semua pihak atau tidak.

Dalam penerapannya evaluasi ini harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan berbagai sudut pandang yang terlibat dalam konflik. Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan konflik tidak selalu berarti bahwa semua pihak akan sepenuhnya puas dengan hasilnya.

2. Peningkatan Kualitas Hidup

Peningkatan kualitas hidup merupakan salah satu tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan MAHA. Evaluasi terhadap dampak dari pemberdayaan ini terhadap kualitas hidup masyarakat melibatkan beberapa aspek penting:

Pertama, Pendidikan, Pemberdayaan melalui MAHA juga dapat memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Ini bisa terjadi melalui penyediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal, program pelatihan keterampilan, atau bahkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat. Evaluasi akan mencakup peningkatan tingkat partisipasi dalam pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat, serta peningkatan tingkat literasi dan keterampilan.

Kedua, Pekerjaan dan Perekonomian Lokal, Melalui pemberdayaan menggunakan MAHA, masyarakat dapat diberdayakan untuk menciptakan peluang ekonomi lokal. Hal ini bisa terjadi melalui program pelatihan, pengembangan koperasi atau usaha kecil menengah (UKM), bantuan dalam pengelolaan sumber daya alam, atau pembukaan akses pasar bagi produk-produk lokal. Evaluasi akan melibatkan pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Ketiga, Kualitas Hidup Sosial dan Psikologis, Selain aspek-aspek materi, evaluasi juga perlu mempertimbangkan peningkatan kualitas hidup dari segi sosial dan psikologis. Ini bisa berupa

peningkatan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat, peningkatan kebersamaan, serta peningkatan kebahagiaan dan kepuasan hidup.

Dalam penerapannya Evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan MAHA dalam konteks peningkatan kualitas hidup memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk memahami dampaknya secara menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat yang diberdayakan.

3. Keterlibatan Pihak Terkait

Keterlibatan pihak terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan MAHA merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan dari program atau inisiatif tersebut. Evaluasi yang mempertimbangkan tingkat keterlibatan pihak terkait harus mencakup beberapa aspek penting:

Pertama, Partisipasi dan Keterlibatan Komunitas Setempat, Tingkat partisipasi dan keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sangat penting. Evaluasi harus menilai sejauh mana komunitas setempat terlibat dalam pengambilan keputusan, implementasi program, dan apakah aspirasi serta kebutuhan mereka diakomodasi dengan baik.

Kedua, Sumber Daya yang Tersedia, Evaluasi harus menilai ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dari pihak-pihak terkait, termasuk dana, tenaga kerja, kepemimpinan, jaringan, dan infrastruktur yang dapat mendukung keberhasilan program.

Ketiga, Keterbukaan terhadap Pembelajaran dan Perbaikan: Evaluasi harus menilai sejauh mana pihak terlibat terbuka terhadap evaluasi diri, pembelajaran dari kesalahan, dan perbaikan berkelanjutan. Sikap yang terbuka terhadap umpan balik dan perubahan dapat meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, evaluasi terhadap keterlibatan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan MAHA dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan antarpihak terlibat dan dampaknya terhadap keberhasilan program tersebut.

KESIMPULAN

Evaluasi memainkan peran sentral dalam memastikan efektivitas dan kelangsungan program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi tidak sekadar proses rutin, tetapi menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya.

Melalui evaluasi, program pemberdayaan dapat diukur efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan penilaian terhadap keberhasilan program dan identifikasi tantangan yang dihadapi, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan dampaknya. Evaluasi juga memastikan bahwa dampak dari program ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui konsep Mujadalah Bil-Lati Hiya Ahsan, menekankan pentingnya dialog terbuka dan saling pengertian. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan, mengambil peran dalam menentukan arah pembangunan yang lebih baik, dan memperkuat nilai-nilai yang mendukung pembangunan sosial dan spiritual yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan program, tetapi juga mempertimbangkan proses partisipatif dan dampak sosial-ekonomi serta psikologisnya.

Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Mujadalah Al Lati Hiya Ahsan (MAHA) harus mencakup aspek-aspek penting, seperti pemecahan konflik yang adil, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan keterlibatan pihak terkait. Ini membutuhkan evaluasi yang holistik, menggali dampak program dari segi pendidikan, ekonomi lokal, aspek sosial, dan keterlibatan komunitas dalam proses pembangunan. Keseluruhan, evaluasi ini memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat sesaat, melainkan menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya Nirmaya, G. (2019). Perencanaan Program Pelatihan Masyarakat dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.4>

- Hanif, A. dan M. (2021). Konsep dan pengembangan metode dakwah di era globalisasi. *Jurnal Da'wah Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 4(2).
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, XIII(2), 50–62.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Nomor 1).
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Masrul, E. U. H. (2010). *Metode Pemberdayaan berbasis dakwah. Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. JURNAL AT-TAGHYIR Vol.3, No.1. 3, 149–170.
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670.Poerwanto>.
- Sandi, F., City, P., & Province, R. (n.d.). *MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PEKANBARU PROPINSI RIAU The Influence of Empowerment through Village Economic Institutional Development on Community Welfare at Rumbai Sub-district* ,. 301–359.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.